



# Dugaan Korupsi Pengadaan HT Mencuat

**SETELAH** kasus korupsi pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) ditangani Bareskrim Polri, kini giliran dugaan korupsi terjadi dalam pengadaan Handy Talkie (HT) sebesar Rp17,5 miliar dan Rig Radio Tranking sebesar Rp 12,995 miliar.

Total dari dua proyek itu mencapai sekitar Rp 30 miliar. Proyek pengadaan ini merupakan hasil usulan dari Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta melalui pokok pikiran (pokir) dalam APBD Perubahan 2014. Pengadaan dua proyek ini berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov DKI Jakarta.

Dari data hasil lelang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), pemenang tender proyek pengadaan rig radio tranking adalah PT Inticom Sentralindo dengan penawaran sebesar Rp 12,344 miliar. Sedangkan satu perusahaan lainnya yang menjadi pemenang adalah PT Prima Reka Teknologi selaku pemenang tender pengadaan HT Tranking dengan penawaran sekitar Rp 15,7 miliar.

Salah satu perusahaan pemenang tender mengakui telah memenangkan proyek tersebut saat proses lelang di ULP. "Tapi enggak tahu kenapa ada salah satu perusahaan yang menyanggah terus, kami enggak jadi dapat proyek tersebut," ujar seorang direksi perusahaan pemenang tender yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi, kemarin.

Dalam perjalanannya pihak pemenang tender tak bisa menjalankan proyek tersebut karena tiba-tiba ada pembatalan lelang. Namun proyek tersebut malah dilakukan secara Penunjukan Langsung (PL) pada salah satu perusahaan yang dinyatakan kalah dalam lelang.

Anehnya, proyek dengan sistem PL hanya diperbolehkan dengan batas maksimal anggaran Rp 200 juta.

Pengadaan kedua proyek ini akhirnya dijalankan oleh PT Niaga Buana Indonesia. Padahal harga yang ditawarkan mereka lebih tinggi sekitar Rp2 miliar dari perusahaan pemenang tender. Saat dikonfirmasi kepada salah satu staf ULP di Pemprov DKI, diakui adanya proses lelang pengadaan HT tracking. Namun dibatalkan lantaran terdapat sanggahan dari pihak lain. Kendati tak ada surat keputusan apapun, proyek tersebut tetap dilaksanakan.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menegaskan, banyak proyek di lingkungan Pemprov DKI yang terindikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. "Yang selama ini terungkap hanya sebagian kecil saja. Kalau mau jujur, harus dibongkar semua permainan yang merugikan keuangan daerah itu. Termasuk kasus pengadaan HT ini, harus dikupas tuntas," pungkas dia. **(rul)**